DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiardjo, Miriam. 2019. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

HR, Ridwan. 2023. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huda, Ni'matul. 2021. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Indrati, Maria Farida. 2020. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

Mahfud MD, Moh. 2022. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Mukhlis dan Amrizal. 2017. Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Lhokseumawe: Unimal Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra. 2003. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2012. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti. 2018. Good Governance dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2014. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

C. Wawancara

Wawancara dengan Auliaurrahman, S.H., S.Pd.I., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, 1 Juli 2026.

Wawancara dengan Dr. Liza Agnesta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, 1 Juli 2026.

Wawancara dengan Gunawan Abdillah, S.STP., M.SP., Sekretaris DPRK Langsa, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Meka Elizar, S.H., M.H., Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRK Langsa, 18 Juni 2026.

Wawancara dengan Mukhlis, S.H., M.H., Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRK Langsa, 30 Juni 2026.

Wawancara dengan Ngatiman, S.Pd., Ketua Panitia Legislasi DPRK Langsa, 17 Juni 2026.

Wawancara dengan Noma Khairil, S.K.H., Wakil Ketua DPRK Langsa, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Sri Verawati, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa, 29 Juni 2026.